

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GEROKGAK

Kadek Dwik Ariasih^{1*}, Gde Herry Sugiarto Asana², Sarita Vania Clarissa³

^{1,2,3}Universitas Triatma Mulya, Badung, Indonesia

Corresponding author: kadekdwiariasih@gmail.com^{1}



Abstract

Tujuan Pengelolaan Dana Desa meliputi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang efisien, transparan, bertanggung jawab, partisipatif, tertib, dan disiplin fiskal. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah apakah akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Populasi penelitian adalah warga Perangkat Desa Kecamatan Gerokgak yang berjumlah 56 orang. Populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dengan jumlah responden sebanyak 56 orang yang terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 1 bendahara desa (kepala keuangan), dan 1 BPD desa, penelitian ini mampu menarik kesimpulan yang bermakna. Metode analisis data yang digunakan adalah: analisis deskriptif, uji kualitas data, regresi linier berganda, uji t, determinasi, dan uji asumsi klasik. Temuannya menunjukkan bahwa tanggung jawab penanganan uang desa yang lebih tinggi akan terjadi apabila penanggung jawab dana tersebut mempunyai kompetensi. Akuntabilitas pengelolaan uang desa dapat ditingkatkan dengan keterlibatan masyarakat yang kuat dalam memantau berfungsinya pemerintahan desa. Akuntabilitas yang lebih baik adalah manfaat lain dari penggunaan TI dalam operasional pemerintahan desa.

Keywords: akuntabilitas; dana desa

Abstract

The goals of Village Fund Management include the efficient, transparent, responsible, participative, orderly, and fiscally disciplined execution of legislative rules. The question that this study seeks to answer is whether or if the accountability of village budget management is affected by apparatus competence, community engagement, and the use of information technology. A total of 56 Village Apparatus residents from Gerokgak District made up the study's population. A population is used as a sample in this study. With 56 total respondents, including 1 village chief, 1 village secretary, 1 village treasurer (finance head), and 1 village BPD, this research was able to draw meaningful conclusions. The following methods are used for data analysis: descriptive analysis, data quality test, multiple linear regression, t-test, determination, and classical assumption test. The findings indicate that higher responsibility for handling village money will occur if the people in charge of the funds are competent. Accountability in the management of village money may be improved with strong community involvement in monitoring the functioning of village administration. Better accountability is another benefit of using IT into village government operations.

Keywords: *accountability ; village funds*

Pendahuluan

Pemerintahan Joko Widodo memiliki sembilan tujuan utama. Nawa Cita adalah nama yang diberikan untuk sembilan tujuan tersebut. Dengan memperkokoh banyak daerah dan desa dalam kerangka satu bangsa, Nawa Cita bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Karena ketimpangan pembangunan infrastruktur dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa pada periode sebelumnya, maka lahirlah inisiatif ini (Prasetyo 2017). Seluruh masyarakat Indonesia akan segera memiliki akses terhadap infrastruktur yang lebih baik berkat pendanaan dari Presiden Joko Widodo.

Yang dimaksud dengan “dana desa” adalah sebagian dari anggaran APBN yang digunakan untuk mendukung pemerintah daerah di berbagai bidang seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan penguatan (sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Salah satu sumber pendanaan baru bagi desa adalah Anggaran Pendapatan dan Alokasi Provinsi (APBN) yang merupakan bagian dari Dana Desa. Secara bertahap, setiap kota mendapatkan dan mengawasi anggaran tambahan yang disebut dana desa. Penyaluran dana ke setiap desa ditentukan oleh empat kriteria: jumlah penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan, dan tantangan geografis.

Tujuan utama Dana Desa adalah untuk mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat dan program lokal di bidang perumahan, pembangunan, infrastruktur, dan kesehatan. Meningkatnya pendapatan dan berkembangnya perekonomian adalah hasilnya. Warga negara perorangan atau kelompok masyarakat. Setiap komunitas dapat mendiversifikasi sumber pendapatannya dengan bantuan dana desa. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, semakin banyak uang yang digunakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan setiap orang. Namun, memiliki uang komunitas membuat pengelolaan uang tersebut menjadi sulit. Efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, patuh terhadap peraturan, dan disiplin fiskal merupakan ciri-ciri penyelenggaraan dana desa yang baik.

Kenyataannya adalah orang yang ceroboh masih melakukan penipuan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022, sektor desa diperkirakan memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi, dengan sebagian besar penggelapan keuangan daerah dilakukan oleh kepala desa. Tahun lalu, 252 orang terlibat dalam 155 kasus korupsi di industri ini, menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Total kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum pada tahun 2022 sebanyak 26,77 kasus sebagaimana terlihat pada statistik tersebut. Sejak tahun 2021, ketika terdapat 154 kasus korupsi di sektor desa, jumlah kasus korupsi uang desa mengalami peningkatan.

Kegiatan korupsi terkait dana desa di Kabupaten Buleleng tahun 2017 antara lain penggelapan APBDes tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang dilakukan oleh Kepala Desa Dencharik di Kabupaten Banjar yang meliputi musyawarah desa, bansos, dan lain-lain termasuk dana untuk persiapan kegiatan. Jaksa Kejaksaan Negeri (Kedjari) Singaraja menemukan dua buku dalam pemeriksaan. Buku pertama merupakan laporan sesuai APBDes dan buku kedua merupakan buku arus kas. Diketahui pendapatan asli desa tidak sesuai laporan APBDes dan kerugian sebesar Rp 149 juta orang (Bali Post, 2017) Jika masyarakat ingin memastikan bahwa uang yang diperoleh desa dari pemerintah federal tidak dicuri, mereka perlu memastikan bahwa pemerintah daerah dan badan pengawas melakukan tugasnya dengan baik. Menjaga integritas anggaran pembangunan desa.

Karena hal ini menyoroti perlunya meminta pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan mereka, maka setiap tindakan mereka perlu diawasi (Widyatama & Novita, 2017). Kompetensi tidak terlepas dari tanggung jawab penyelenggaraan keuangan desa. Jika Anda mampu melakukan tugas tersebut, Anda dapat membantu pihak berwenang setempat mempelajari cara menangani uang dengan benar. Mungkin terdapat perbedaan antara kriteria yang diamanatkan pemerintah dan laporan keuangan jika para pemimpin daerah tidak memahami hal ini.

Menurut Widyatama dan Novita (2017), fungsi agen merupakan komponen akuntabilitas yang sangat penting dalam pengelolaan uang desa, karena peraturan ini mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa. Kompetensi tidak terlepas dari tanggung jawab penyelenggaraan keuangan desa. Untuk kompeten melakukan suatu pekerjaan atau tugas secara profesional dan efisien, seseorang harus memiliki informasi, keterampilan, bakat, dan nilai-nilai pribadi yang merupakan produk dari pendidikan dan pengalaman kerja seseorang (Moeheriono, 2018). Aparat di desa dapat menangani sumber

daya yang mereka miliki dengan lebih baik jika mereka mempunyai kapasitas yang diperlukan. Masyarakat bisa saja mendapatkan informasi yang salah dan membiarkannya mempengaruhi pengambilan keputusan jika hal ini tidak disadari, karena pelaporan keuangan yang dihasilkan bisa saja salah atau tidak sesuai dengan aturan pemerintah (Medianti, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa dipengaruhi secara positif oleh literasi peralatan, menurut penelitian Atiningtyas & Ningtyas (2019). Selain itu, menurut Alauddin (2020), akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi positif oleh literasi peralatan. Namun menurut Indrawari dan Rahayu (2021), Atiningtyas & Ningtyas dan Also Alauddin justru berpendapat sebaliknya. Konsekuensinya terhadap tanggung jawab dalam mengawasi kas desa.

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mengelola sumber daya desa, keterlibatan masyarakat sangat penting. Individu lebih mungkin untuk mengambil bagian jika mereka melihat orang lain mengambil bagian. Pertumbuhan yang lebih baik mungkin terjadi ketika masyarakat terlibat secara aktif karena hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dalam melaksanakan pilihan yang diambil. Pengelolaan sumber daya desa yang efektif akan menghasilkan pertumbuhan positif (Medianti, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi secara positif oleh keterlibatan masyarakat, menurut penelitian Atiningtyas & Ningtyas (2019).

Terdapat korelasi yang baik antara keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas desa dalam pengelolaan keuangan, menurut penelitian Alauddin. Namun menurut penelitian Indraswari dan Rahayu (2020), keterlibatan masyarakat tidak berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Informasi juga diperlukan bagi kelompok untuk memanfaatkan teknologi dalam mengelola sumber daya lokal (Perdana, 2018). Penggunaan TI juga diperlukan untuk pelaporan keuangan yang dapat dipercaya. Pemrosesan data, pemrosesan informasi, sistem manajemen, dan alur kerja elektronik merupakan contoh bagaimana teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan publik.

Alauddin (2020) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi secara positif oleh penerapan teknologi informasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Indraswari dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa teknologi meningkatkan tanggung jawab pengelolaan dana desa. Tanggung jawab dalam penganggaran desa telah menjadi subyek banyak penelitian di masa lalu. Alaudin (2020) menemukan bahwa teknologi secara signifikan mengurangi tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa, namun keterlibatan masyarakat dan kemampuan instrumen pengelolaan dana desa meningkatkan akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada lembaga pemerintahan desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga pengelolaan keuangan desa, dan sistem pengelolaan internal (Atiningsih & Ningtyas, 2019).

Peneliti tertarik untuk mendalami lebih dalam topik akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan mengkaji dampak kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini merespons realitas adanya pengalihan dana desa dan kesenjangan temuan penelitian sebelumnya.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menyatakan bahwa pemerintah desa, meskipun mewakili masyarakat (kepala sekolah), sepenuhnya menyadari kepentingannya sendiri dan tidak dapat diandalkan untuk bertindak secara memadai demi kepentingan terbaik masyarakat. Menurut teori keagenan, pelaku (masyarakat) dan agen (pemerintah) mempunyai tingkat pengetahuan yang sangat berbeda karena pelaku mempunyai akses langsung terhadap data yang relevan.

Pengelolaan keuangan desa bisa menjadi bermasalah jika terjadi ketidakseimbangan informasi (Nurkhasanah, 2019).

Pemerintah desa diberi tanggung jawab untuk menyajikan laporan mengenai penanganan keuangan desa, sehingga teori keagenan berperan dalam penelitian ini. Kerabat (pelanggan) harus berusaha. Hal ini dimaksudkan agar para pemimpin dan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa dapat memimpin pengelolaan dan pengorganisasian keuangan masyarakat, serta memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan bertanggung jawab. Individu yang dipercaya publik mempunyai kewajiban untuk menjelaskan hasil-hasilnya dan membuat informasi mengenai laporan pengelolaan keuangan desa tersedia untuk umum demi kepentingan akuntabilitas dan keterbukaan. Salah satu cara untuk mengurangi dampak asimetri informasi adalah dengan menjadikan pengelolaan dana desa lebih akuntabel dan transparan.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan pejabat publik agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46 A Tahun 2003. Pegawai mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional, efisien, dan cara yang efektif karena tugas-tugas ini. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas desa, kompetensi dalam mengelola dana desa sangatlah penting. Pengelolaan keuangan desa sebagai konsekuensi dari desentralisasi fiskal harus siap dilaksanakan karena tanggung jawab ini akan dilimpahkan dari pemerintah federal kepada pemerintah daerah dan pada akhirnya kepada pemerintah desa. Menurut Widyatama dan Novita (2017), salah satu bidang yang harus direncanakan adalah sumber daya manusia.

Partisipasi Masyarakat

Secara umum, "partisipasi" adalah nenek moyang etimologis dari "partisipasi" dalam bahasa Inggris. "Partisipasi" bisa berarti lebih dari sekadar hadir; itu juga bisa berarti terlibat secara aktif atau mengambil bagian dalam sesuatu (Solekhan, 2014). Sumarto dalam Sembodo (2006) mengemukakan bahwa partisipasi adalah suatu proses yang memfasilitasi peningkatan hubungan dan interaksi antar individu, meningkatkan kemungkinan terjadinya kesepakatan dan tindakan inovatif yang muncul dari konsultasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa mendengarkan, belajar, dan berbicara dapat membuka ruang untuk refleksi, inisiasi proyek, dan aksi bersama.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Selain komputer (perangkat keras dan perangkat lunak), teknologi komunikasi yang mengirimkan dan mendistribusikan data juga merupakan bagian dari teknologi informasi yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data (Martin, 1999, dikutip dalam Murhada & Giap, 2011). Sebagai salah satu komponen teknologi informasi, komputer merupakan instrumen yang dapat melipatgandakan kemampuan manusia dan melakukan tugas-tugas yang tidak mampu dilakukan oleh manusia.

Dana Desa

Berdasarkan UU 60 Tahun 2014, Dana Desa dialokasikan dari APBN dengan tujuan untuk mendukung operasional desa. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota, yang disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Kas Desa. Rekening (RKDesa). Pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, tabungan dan pembayaran, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan semuanya menggunakan uang desa. Setiap tahunnya, APBN digunakan pemerintah untuk menyebarkan pendapatan desa ke seluruh pelosok tanah air. Pengeluaran

pemerintah masuk ke dalam anggaran daerah, sehingga program desa menjadi lebih adil dan berhasil.

Pengelola Keuangan Desa

Perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Setiap langkah pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari siklus integrasi yang lebih besar. Terorganisir dan dianggarkan, penyelenggaraan keuangan desa didasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan keterlibatan. Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembangunan sosial desa, dan penguatan masyarakat desa dapat berjalan sesuai rencana dan mewujudkan visi desa dan masyarakat sejahtera, setiap desa harus menerapkan seperangkat asas dan asas. manajemen keuangan.

Metode Penelitian

Akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa menjadi fokus penelitian ini, yang berupaya memahami hubungan antara literasi perangkat, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan TI. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Pejabat dari beberapa desa di Kecamatan Gelogak disurvei dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini hanya berjumlah 56 responden dari perusahaan desa di Kecamatan Gerokgak. Satu orang kepala desa, satu orang sekretaris desa, satu orang bendahara desa (pengelola keuangan), dan satu orang Badan Pertimbangan Desa (BPD) berjumlah 56 responden; sampel ini diperoleh dengan menggunakan teknik sampling sensus atau sampling jenuh. Analisis regresi linier berganda merupakan pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 1. Uji Normalitas
One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N	Mean	56
Normal Parameters ^{a,b}	Std.	,0000000
	Deviation	1,75493746
	Absolute	,076
Most Extreme Differences	Positive	,068
	Negative	-,076
	Test Statistic	,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true sign		

Berdasarkan Tabel 1. diperoleh nilai Asymp.Sig sebesar 0.200 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti residual dalam peneliian berdistribusi normal.

Uji Mukltikolinearitas

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Unstandar dized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.167	1.573		.742	.461		
Kompetensi Aparatur (X1)	.340	.101	.410	3.375	.001	.376	2.659
Partisipasi Masyarakat (X2)	.254	.192	.305	2.491	.016	.370	2.704
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.199	.090	.225	2.210	.032	.536	1.866

Sumber : Data diolah, 2024

Seluruh variabel penelitian memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1, seperti terlihat pada Tabel 2. Hal ini berarti bagi penelitian dan regresi adalah variabel independen tidak berkorelasi satu sama lain. Multikolinearitas tidak ditampilkan dalam model.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandar dized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	2.906	.827		3.514	.101
Kompetensi Aparatur (X1)	.112	.053	.436	2.110	.590
Partisipasi Masyarakat (X2)	-.094	.054	-.365	-1.753	.485
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	-.094	.047	-.339	-1.959	.356

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi variabel independen residual absolut lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian atau variansi residualnya sama pada setiap observasi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F hitung sebesar 42,629. Dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05, maka model ini dapat digunakan untuk meramalkan pengaruh literasi peralatan, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan TI terhadap tugas pengelolaan keuangan desa. Hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	416.593	3	138.846	42.629	.000 ^b
Residual	169.389	52	3.257		
Total	585.982	55			

a. Dependen Variabel: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji adjust R2 pada penelitian ini menghasilkan nilai sebesar 0,694. Tanggung jawab pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi ditemukan sebesar 69,4%, sedangkan sisanya sebesar 30,6% terbukti dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.711	.694	1.805

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Uji Parsial

Kekuatan penjelas suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat diperiksa dengan menggunakan uji-t. Dengan membandingkan nilai setiap koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan, uji t dapat mengukur pentingnya pengaruh suatu pilihan. Tabel 6 menampilkan hasil subtest yaitu uji-t.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.167	1.573		.742	.461

Kompetensi Aparatur (X1)	.340	.101	.410	3.375	.001
Partisipasi Masyarakat (X2)	.254	.102	.305	2.491	.016
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.199	.090	.225	2.210	.032

Temuan uji-t dalam penyelidikan ini diambil dari Tabel 6. sesuai dengan apa yang dikatakan di bawah ini:

1. Kompetensi Aparatur

Uji t Kompetensi Aparatur menghasilkan temuan statistik dengan nilai t sebesar 3,375 dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Jadi, bisa dikatakan Kompetensi Aparatur memang meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Uji t partisipasi masyarakat menghasilkan nilai t sebesar 2,491 dan tingkat signifikansi 0,016 kurang dari atau sama dengan 0,05. Hal ini memperkuat gagasan bahwa keterlibatan masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Penerapan Teknologi Informasi

Nilai t hitung Penggunaan Teknologi Informasi dalam uji t statistik adalah 2,210 dan tingkat signifikansinya adalah 0,032 yang kurang dari atau sama dengan 0,05. Hal ini memperkuat gagasan bahwa penggunaan TI dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti yang diajukan dalam hipotesis.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil pengujian, kami dapat menerima hipotesis nol (H1). Nilai signifikansinya sebesar 0,001 kurang dari atau sama dengan 0,05, maka hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kapasitas peralatan berhubungan dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Kapasitas memahami dan menggunakan uang desa dengan baik berkorelasi positif dengan literasi peralatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alaudin (2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi positif oleh literasi peralatan. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa literasi peralatan meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya desa. Teori keagenan menyatakan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan desa, kepala dan aparat desa diharapkan memimpin pengelolaan anggaran desa, membangun koneksi, dan pelaporan secara terbuka dan bertanggung jawab. Mereka yang mempunyai kepercayaan harus bisa menyampaikan informasi kepada publik tentang laporan pengelolaan keuangan desa dan mempertanggungjawabkan tindakannya agar ada akuntabilitas dan transparansi di masyarakat.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Temuan penelitian ini mendukung penerimaan hipotesis kedua (H2). Nilai signifikan sebesar $0,016 < 0,05$ dinyatakan pada hipotesis kedua yang menyatakan terdapat variasi keterlibatan masyarakat dalam tugas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa dipengaruhi secara positif oleh keterlibatan masyarakat. Konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Atiningtyas dan Ningtyas serta Alauddin (2020), penelitian ini

menemukan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa tugas desa dalam mengelola keuangannya dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat. Teori keagenan menyatakan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan desa, kepala dan aparat desa diharapkan memimpin pengelolaan anggaran desa, membangun koneksi, dan pelaporan secara terbuka dan bertanggung jawab. Mereka yang mempunyai kepercayaan harus bisa menyampaikan informasi kepada publik tentang laporan pengelolaan keuangan desa dan mempertanggungjawabkan tindakannya agar ada akuntabilitas dan transparansi di masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berikut temuan pengujiannya: kami menerima hipotesis ketiga (H3). Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi, dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi secara positif oleh penerapan teknologi informasi. Kesimpulan penelitian ini bahwa berbagai penggunaan teknologi informasi berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan desa sejalan dengan penelitian Alauddin (2020). Menurut teori keagenan, salah satu pendekatan untuk mengurangi asimetri informasi melalui penggunaan TI adalah dengan mengawasi pengeluaran. Pemerintah federal atau regional bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas pejabat yang ditunjuk secara politik dalam mengelola dana melalui pengembangan dan penggunaan teknologi informasi. Selain itu, dengan penerapan TI yang tepat, maka penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa akan lebih efisien, akurat, dan tepat sehingga kesalahan yang dilakukan lebih sedikit dan tanggung jawab pemerintah desa menjadi lebih besar

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Transparansi dan tanggung jawab pengelolaan dana daerah akan lebih baik berkat adanya aparatur desa yang berkaliber tinggi. Efektivitas pengelolaan dana desa akan sangat meningkat apabila pegawai mempunyai kompetensi yang tinggi, yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan sikap positif. Hal ini memastikan bahwa mereka selalu beroperasi secara efektif, efisien, dan produktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari atau sama dengan 0,05.
2. Pengelolaan uang desa akan lebih akuntabel jika masyarakat ikut aktif mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Alasannya, kemajuan di masa depan berbanding lurus dengan tingkat investasi pribadi, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas atas pilihan yang diambil. Penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,016 \leq 0,05$.
3. Selain itu, akuntabilitas ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena seluruh data dan informasi digabungkan dan ditindaklanjuti dengan menggunakan teknologi berkualitas tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini dengan nilai signifikansi $0,032 \leq 0,05$.

Saran

1. Karena penelitian ini tidak membahas seluruh permasalahan yang mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan keuangan desa, maka peneliti selanjutnya diyakini dapat mengisi kesenjangan tersebut. Desa dan sampel juga dapat dimasukkan ke dalam penelitian.

2. Untuk memastikan responden bersikap objektif saat mengisi kuesioner, pendekatan wawancara harus disertakan dalam proses pengumpulan data.
3. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap pengetahuan yang ada mengenai topik literasi perangkat, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa melalui pemanfaatan teknologi informasi.

References

- Alauddin. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal). *skripsi*.
- Deviyanti, dan Erlina Wati.2022. Pengaruh Kompetensi,Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kab Badung). *Hita Akuntansi dan Keuangan*, Vol.27 No.1, pp 51-90
- Atiningsih, S., dan Ningtyas, A. C.2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 10(1), 1-26.
- Aziiz, M. N. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344.
- Banga, W. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. (Cetakan 1). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Haag, S., dan Keen, P. 1996. *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today*. New York: McGraw-Hill.
- Undang-Undang tentang Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta, DKI. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Databoks.(2022). Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak--2022>. 23 Juli 2023
- Gerokgak.Bulelengkab.(2019).Peta Kecamatan Gerokgak. <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank-data/peta-kecamatan-gerokgak-25>
- Gerokgak Bulelengkab (2020) Data Kecamatan Gerokgak <https://balitbang.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/14-data-kecamatan-gerokgak-buleleng>
- Wikipedia (2023) Batas Wilayah Kecamatan Gerokgak https://id.wikipedia.org/wiki/Gerokgak,_Buleleng
- Adimanweb(2023). Jumlah Desa Di Kecamatan Gerokgak. <https://www.adiman.web.id/kodepos/k-81155-gerokgak-kec-gerokgak>. 23 Juli 2023
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Cetakan 23). Bandung: Alfabeta.
- Disdukcapil (2019) Jumlah Penduduk per Desa Kecamatan Gerokgak

https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/jumlah-penduduk-per-des-kecamatan-gerokgak-kabupaten-buleleng-data-semester-ii-tahun-2019-51

Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.